

Mengkaji Kembali Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia: Pembelajaran dari Analisis Bibliometrik dan Tinjauan Literatur

William Ben Gunawan^{1*}

¹Universitas Siber Asia, Pasar Minggu, Jakarta 12550, Indonesia

*Alamat Email Penulis Koresponden: wbilliambenwb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan batas negara serta menemukan solusi-solusi untuk menangani permasalahan tersebut berdasarkan literatur. Penelitian ini menganalisis perkembangan dan tren penelitian terkait *border management* dalam literatur ilmiah selama kurun waktu 2016 – 2024, dengan fokus khusus pada pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Kajian teoritis dan landasan teori yang digunakan mencakup konsep keamanan nasional, kerjasama internasional, kebijakan publik, manajemen risiko, serta implementasi teknologi seperti *artificial intelligence* dalam pengelolaan perbatasan. Dengan pendekatan bibliometrik menggunakan perangkat *VOSviewer*, studi ini memvisualisasikan jaringan kata kunci dan overlay tren penelitian yang mencerminkan dinamika pengelolaan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *border management* merupakan topik sentral yang memiliki hubungan kuat dengan isu *sovereignty*, *fundamental rights*, *cross-border cooperation*, dan perkembangan teknologi berbasis manajemen sistem. Tren penelitian juga memperlihatkan adanya pergeseran fokus dari keamanan tradisional ke arah integrasi teknologi digital, aspek keberlanjutan seperti keamanan pangan dan lingkungan hidup, serta efisiensi manajemen risiko di kawasan perbatasan. Selain itu, studi ini mengidentifikasi lima kluster utama yang meliputi aspek keamanan, kebijakan publik, hak fundamental, teknologi manajemen, dan teori wilayah perbatasan. Temuan ini memberikan wawasan komprehensif terkait tantangan dan peluang pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, terutama dalam konteks kebijakan berbasis teknologi dan upaya memperkuat ketahanan serta kedaulatan nasional.

Kata Kunci: Manajemen Kawasan Perbatasan, Keamanan Nasional, Hubungan Internasional, Manajemen Risiko, Kebijakan dan Regulasi

Abstract

This study aims to understand the existing issues related to national borders and to identify potential solutions for addressing these challenges based on the literature. It analyzes the development and research trends on border management in scientific publications from 2016 to 2024, with a particular focus on Indonesia's border area management. The theoretical framework incorporates concepts of national security, international cooperation, public policy, risk management, and the application of emerging technologies such as artificial intelligence in border governance. Using a bibliometric approach with VOSviewer software, this study visualizes keyword networks and research trend overlays that illustrate the dynamics of border management. The results indicate that border management is a central topic closely associated with issues of sovereignty, fundamental rights, cross-border cooperation, and technology-based management systems. The research trend also shows a shift from traditional security perspectives toward the integration of digital technologies, sustainability aspects such as food and environmental security, and enhanced risk management efficiency in border areas. Furthermore, the study identifies five major clusters encompassing security, public policy, fundamental rights, management technology, and border theory. These findings provide comprehensive insights into the challenges and opportunities of Indonesia's border area management, particularly in the context of technology-driven policies and efforts to strengthen national resilience and sovereignty.

Keywords: Border Area Management, National Security, International Relations, Risk Management, Policy and Regulation

1. PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki nilai penting bagi Indonesia, baik dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan dan keamanan (Ali & Sianturi, 2022). Letak geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara menjadikannya sebagai area vital dalam menjaga kedaulatan negara. Namun demikian, kawasan perbatasan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pelanggaran hukum lintas batas, pengelolaan sumber daya yang tidak optimal, dan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Hal ini mengindikasikan perlunya pengelolaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Masalah delimitasi, delineasi, dan demarkasi batas negara menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius (Mangku, 2017). Ketiga aspek ini melibatkan penentuan, penggambaran, dan penetapan garis batas yang jelas antara Indonesia dan negara tetangga. Kurangnya kejelasan dalam batas wilayah sering kali menjadi pemicu konflik antarnegara dan berdampak pada hubungan diplomatik. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di kawasan perbatasan menjadi celah bagi berbagai aktivitas ilegal yang merugikan negara, seperti penyelundupan barang, pencurian ikan, dan perdagangan manusia.

Di sisi lain, kawasan perbatasan juga menghadapi tantangan dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Banyak wilayah perbatasan yang masih terisolasi dan minim akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur transportasi (Sudiar, 2017). Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat setempat dan menambah kerentanan terhadap pengaruh negatif dari luar, seperti kegiatan atau transaksi ilegal dan infiltrasi budaya asing.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi terkait pengelolaan wilayah perbatasan, seperti UU RI No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU RI No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dan UU RI No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang efektif guna meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terkait dengan batas negara. Lebih lanjut lagi, penelitian ini mencoba menganalisis solusi-solusi untuk menangani permasalahan tersebut berdasarkan literatur.

2. METODE

2.1 Analisis Bibliometrik

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis literatur akademik tentang kawasan perbatasan. Analisis bibliometrik memungkinkan penilaian objektif terhadap tren penelitian, pola, dan publikasi yang berpengaruh, menjadikannya metode yang ideal untuk memetakan lanskap intelektual kewirausahaan pemuda (Donthu et al., 2021). Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif tentang bidang ini dengan mengevaluasi metrik seperti jumlah kutipan, kemunculan kata kunci, dan jaringan kepenulisan bersama, sehingga mengungkap struktur intelektual domain penelitian dan mengidentifikasi tema dan perkembangan utama.

Untuk memastikan relevansi dan ketelitian, kriteria ditetapkan untuk memilih studi yang secara khusus terkait dengan tantangan kewirausahaan pemuda. Pada Desember 2024, pencarian dilakukan di database Scopus menggunakan kata kunci "border management". Strategi pencarian ini bertujuan untuk menangkap beragam penelitian, yang mencakup studi dasar dan kemajuan terbaru, memungkinkan analisis menyeluruh tentang masalah dan tren yang berlaku. Scopus dipilih sebagai database utama untuk analisis bibliometrik ini karena cakupannya yang luas dari publikasi peer-review lintas disiplin ilmu serta memberikan pandangan tren secara global (Singh et al., 2021). Scopus menawarkan cakupan pengindeksan yang lebih luas dan data kutipan terperinci, sehingga menguntungkan untuk mengidentifikasi tren penelitian dan menilai dampak publikasi. Selain itu, Scopus memfasilitasi ekspor data yang mudah, memungkinkan analisis yang efisien di VOSviewer, aplikasi untuk memudahkan analisis bibliometrik.

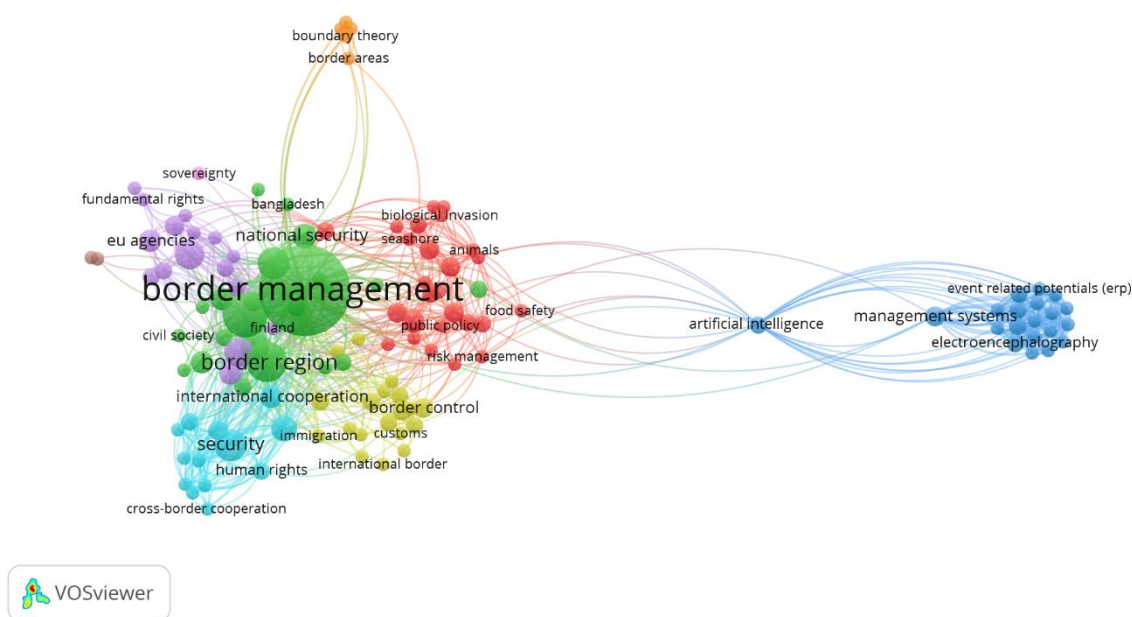
Proses seleksi artikel mengikuti kriteria khusus untuk memastikan relevansi dan kualitas literatur yang disertakan. Tidak ada batasan pada tahun publikasi, memastikan penangkapan tren yang komprehensif. Pencarian ini menghasilkan 130 dokumen yang relevan, yang kemudian diekspor dari Scopus ke VOSviewer untuk visualisasi dan analisis. VOSviewer digunakan untuk menghasilkan peta berdasarkan jaringan kemunculan bersama kata kunci, memungkinkan visualisasi yang jelas tentang hubungan tema penelitian. Untuk memastikan relevansi akademik, ambang batas minimum ditetapkan: (i) penulis dengan setidaknya satu dokumen dan (ii) kata kunci dengan kemunculan minimal dua. Proses ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kelompok penelitian yang berfokus pada tema serupa dan menunjukkan kesenjangan dalam literatur di mana eksplorasi lebih lanjut mungkin bermanfaat.

2.2 Kajian Literatur

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan literatur berbasis penelitian ilmiah yang relevan, dengan sumber utama berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks pada Google Scholar periode 2016 – 2024. Pencarian dilakukan dengan kata kunci utama yaitu "border management" atau "kawasan perbatasan Indonesia". Artikel yang digunakan adalah artikel yang dapat diakses, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan dipublikasi dalam bentuk artikel jurnal. Analisis literatur difokuskan pada isu-isu utama seperti pelanggaran hukum lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan efektivitas implementasi regulasi. Kajian ini mencakup sintesis dari berbagai penelitian sebelumnya, identifikasi kesenjangan penelitian, serta rekomendasi berdasarkan bukti empiris. Dengan demikian, hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif terkait pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

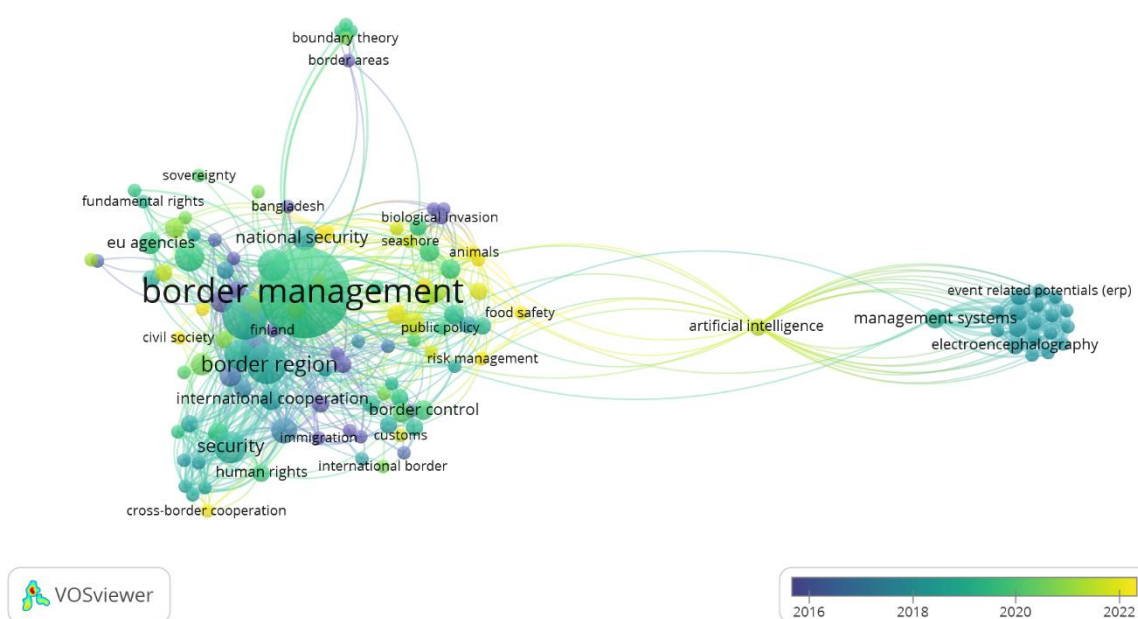
3.1. Hasil Tren Bibliometrik



Gambar 1. Visualisasi Jaringan Kata Kunci Penelitian Terkait Perbatasan Wilayah

Hasil *network visualization* memberikan gambaran struktur hubungan antar kata kunci dalam penelitian *border management*, dengan jaringan yang dikelompokkan berdasarkan warna. Terdapat lima kluster utama yang diidentifikasi, yakni kluster keamanan dan kerjasama internasional (hijau), kebijakan publik dan risiko (merah), hak fundamental dan kedaulatan (ungu), manajemen sistem dan teknologi (biru), serta teori perbatasan dan wilayah (oranye). Kata kunci utama seperti "border management" berada di pusat jaringan, menandakan perannya sebagai tema sentral yang menghubungkan berbagai subtema penelitian.

Dari visualisasi ini, terlihat bahwa kluster hijau sangat menekankan isu keamanan ("security," "border region," "border control," dan "international cooperation"), menunjukkan dominasi penelitian terkait penguatan perbatasan dan kerjasama lintas negara. Kluster biru menunjukkan koneksi kuat dengan teknologi seperti "artificial intelligence," "management systems," dan "event related potentials (ERP)," menegaskan integrasi teknologi berbasis *artificial intelligence* (AI) dalam mengoptimalkan pengelolaan perbatasan. Sementara itu, kluster merah berfokus pada isu "public policy," "risk management," dan "food safety," yang relevan dengan kebijakan perbatasan dan mitigasi risiko lintas batas. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan kompleksitas penelitian *border management*, yang melibatkan aspek keamanan tradisional, kebijakan publik, hak fundamental, serta inovasi teknologi mutakhir.



Gambar 2. Visualisasi Dimensi Waktu Kata Kunci Penelitian Terkait Perbatasan Wilayah

Hasil *overlay visualization* pertama menunjukkan perkembangan tren penelitian terkait border management selama kurun waktu 2016 hingga 2022. Warna dalam grafik menggambarkan perubahan periode penelitian, di mana warna ungu menunjukkan penelitian lebih awal (2016 – 2017), sementara hijau hingga kuning menunjukkan penelitian yang lebih mutakhir (2020 – 2022). Dari visualisasi ini, terlihat bahwa fokus utama penelitian selama periode tersebut berkisar pada kata kunci besar seperti "border management," "national security," dan "border region." Kata kunci ini cenderung berwarna hijau, menunjukkan intensitas penelitian pada aspek keamanan dan pengelolaan perbatasan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, kata kunci baru seperti "artificial intelligence" muncul dalam warna kuning, menandakan integrasi teknologi baru dalam pengelolaan perbatasan. Hubungan antara AI dan *border management* menjadi tren penelitian terkini, berfokus pada peningkatan sistem keamanan, manajemen sumber daya, dan mitigasi risiko lintas batas. Tema lain yang muncul di periode terkini melibatkan "food safety," "risk management," dan "animals," yang mencerminkan perhatian terhadap aspek lingkungan dan keamanan pangan di kawasan perbatasan. Secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan pergeseran dari isu tradisional keamanan fisik menuju integrasi teknologi canggih dan keberlanjutan lingkungan.

3.2. Hasil Kajian Literatur

3.2.1 Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan memiliki arti strategis baik secara geopolitik maupun sosial-ekonomi, menjadikannya area penting dalam pengelolaan suatu negara. Berdasarkan teori *borderland*, perbatasan bukan hanya sekadar garis pembatas geografis, tetapi juga zona interaksi sosial dan ekonomi yang kompleks. Kawasan perbatasan adalah ruang dinamis yang menghubungkan atau memisahkan wilayah negara, tergantung pada pengelolaan dan hubungan bilateral yang terjadi. Dalam konteks Indonesia, dengan batas yang berbagi dengan sepuluh negara, kawasan ini menjadi cerminan keragaman etnis, budaya, dan tata kelola yang memerlukan pendekatan holistik.

Teori ini relevan untuk memahami bagaimana perbatasan dapat berfungsi sebagai penghubung yang memfasilitasi perdagangan lintas negara atau sebaliknya, menjadi penghalang akibat regulasi yang kurang efisien. Kawasan perbatasan di Indonesia, seperti Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menunjukkan peran ganda ini. Keterkaitan sosial dan ekonomi antara masyarakat kedua negara di wilayah ini menciptakan kebutuhan akan pengelolaan yang tidak hanya berbasis hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Selain itu, teori ini menyoroti pentingnya delimitasi (penetapan batas secara hukum), delineasi (penggambaran batas dalam peta), dan demarkasi (penandaan batas secara fisik) dalam mengelola kawasan perbatasan (Sukoco & Sutanta, 2021). Ketiganya menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap negara dapat melaksanakan kedaulatannya dengan jelas dan menghindari sengketa.

Penguatan teori ini dapat dilihat dari praktik negara-negara maju yang memanfaatkan kawasan perbatasannya sebagai zona pertumbuhan ekonomi. Kawasan *special economic zones* (SEZ) di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, misalnya, menunjukkan bahwa perbatasan dapat menjadi pusat penggerak ekonomi sekaligus titik pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ilegal.

3.2.2 Perspektif Geopolitik dan Keamanan

Kawasan perbatasan sering kali menjadi fokus utama dalam geopolitik suatu negara. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan darat, laut, dan udara yang strategis. Berdasarkan teori geopolitik *Rimland Theory*, Indonesia berada di jalur strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya aktor kunci dalam perdagangan dan keamanan global (Spykman, 2017). Dalam teori ini, pengelolaan perbatasan bukan hanya tentang menjaga kedaulatan tetapi juga melibatkan pengelolaan hubungan internasional.

Pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia melibatkan berbagai tantangan, termasuk ancaman aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan perompakan. Secara geopolitik, pengawasan perbatasan juga melibatkan perlindungan terhadap wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam. Laut Natuna Utara, misalnya, sering menjadi sorotan karena tumpang tindih klaim kedaulatan dengan negara lain, seperti Tiongkok (Achyar et al., 2021).

Selain itu, teori geopolitik menekankan pentingnya membangun kekuatan pertahanan yang terintegrasi di wilayah perbatasan. Penempatan pangkalan militer di perbatasan strategis seperti Pulau Natuna dan Morotai mencerminkan implementasi teori ini. Pendekatan ini juga mencakup kerja sama dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas regional.

Namun, aspek keamanan di kawasan perbatasan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi. Wilayah yang terabaikan sering kali menjadi rentan terhadap infiltrasi asing dan aktivitas kriminal. Oleh karena itu, strategi keamanan di kawasan perbatasan harus sejalan dengan pembangunan sosial-ekonomi untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

3.2.3 Teori Pembangunan Wilayah

Dari perspektif pembangunan, teori *Growth Poles* yang dikemukakan oleh Perroux menjadi kerangka penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan wilayah dapat dimulai dari pusat pertumbuhan ekonomi yang strategis dan berdampak pada daerah sekitarnya (Caloffi & Serra, 2022). Kawasan perbatasan, dengan potensi sumber daya alam dan posisinya sebagai pintu gerbang perdagangan, menjadi pusat pertumbuhan baru dengan kebijakan yang tepat.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di wilayah perbatasan seperti KEK Entikong dan KEK Sebatik menunjukkan implementasi teori ini. Pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan fasilitas perdagangan lintas negara menjadi langkah awal dalam menciptakan pusat pertumbuhan. Dampak dari pendekatan ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di mata dunia.

Namun, keberhasilan pendekatan ini memerlukan perencanaan yang matang dan investasi yang berkelanjutan. Wilayah perbatasan sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan aksesibilitas dan rendahnya tingkat pendidikan serta kesehatan masyarakat setempat (Fauni et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

Teori ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan wilayah perbatasan. Insentif pajak dan kemudahan perizinan dapat mendorong investasi di sektor infrastruktur, pariwisata, dan perdagangan. Dengan demikian, kawasan perbatasan dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

3.2.4 Aspek Hukum dan Kedaulatan

Landasan hukum merupakan elemen penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi dasar hukum utama yang mengatur tata kelola perbatasan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur penetapan batas wilayah, pemanfaatan sumber daya, dan perlindungan kedaulatan negara. Dalam perspektif hukum internasional, prinsip *sovereignty* menegaskan hak setiap negara untuk mengelola wilayahnya tanpa campur tangan asing. Indonesia, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional seperti Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Konvensi ini menjadi acuan dalam menetapkan batas maritim, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

Namun, implementasi hukum di kawasan perbatasan sering kali menghadapi tantangan. Sengketa batas wilayah dengan negara tetangga seperti Malaysia, Tiongkok, Vietnam, dan Filipina mencerminkan kompleksitas penerapan hukum di lapangan (Putri et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, baik melalui diplomasi bilateral maupun mediasi internasional. Selain itu, keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan juga bergantung pada penegakan hukum di tingkat lokal. Aparat penegak hukum perlu diberdayakan dengan pelatihan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai aktivitas ilegal yang marak terjadi di kawasan perbatasan. Dengan demikian, kedaulatan Indonesia dapat terjaga secara menyeluruh.

3.2.5 Teori Kriminologi dan Keamanan Perbatasan

Kawasan perbatasan sering kali menjadi tempat aktivitas ilegal yang melibatkan jaringan kriminal lintas negara. Dalam teori kriminologi transnasional, aktivitas kriminal lintas batas seperti penyelundupan dan perdagangan manusia muncul akibat lemahnya pengawasan serta adanya peluang yang diciptakan oleh kondisi geografis dan sosial di kawasan perbatasan. Kejahatan dapat terjadi karena adanya *motivated offenders*, *suitable targets*, dan *lack of capable guardians*.

Dalam konteks Indonesia, aktivitas seperti *illegal fishing* di Laut Natuna atau penyelundupan barang di Kalimantan menjadi tantangan utama. Keterbatasan sumber daya aparat keamanan dan minimnya teknologi pengawasan sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kriminal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penggunaan teknologi seperti drone dan sistem radar (Sabar & Mokodompit, 2024).

Selain itu, pendekatan preventif juga penting dalam mengurangi aktivitas kriminal di kawasan perbatasan. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat lokal dapat mengurangi keterlibatan warga dalam aktivitas ilegal. Dengan memberikan alternatif ekonomi yang legal dan menguntungkan, masyarakat dapat menjadi mitra dalam menjaga keamanan perbatasan.

Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci dalam memberantas jaringan kriminal lintas negara. Kerja sama antara Indonesia dan negara tetangga melalui mekanisme seperti *mutual legal assistance* (MLA) dan patroli gabungan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan (Natasya & Yuniasih, 2023).

3.2.6 Pendekatan Multidimensi Dalam Pengelolaan Perbatasan

Pendekatan multidimensi menjadi kerangka penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia. Berdasarkan teori *governance*, pengelolaan perbatasan memerlukan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap tantangan di lapangan. *Good governance* di kawasan perbatasan mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Maulana & Rakhman, 2020). Misalnya, pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta mengurangi potensi konflik. Selain itu, penggunaan data berbasis teknologi informasi dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien.

Pendekatan ini juga mencakup integrasi antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Program pembangunan ekonomi seperti KEK harus diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan (Setiawan & Sudja, 2021). Selain itu, program sosial seperti pelatihan kewirausahaan dan peningkatan layanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dengan mengadopsi pendekatan multidimensi, kawasan perbatasan Indonesia dapat dikelola secara berkelanjutan, baik dalam aspek keamanan, ekonomi, maupun kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini akan mendukung pencapaian tujuan nasional untuk menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan daya saing global.

4. KESIMPULAN

Wilayah perbatasan Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mencakup aspek keamanan, ekonomi, sosial, dan hukum. Kelemahan dalam pengelolaan kawasan ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara, baik secara material maupun nonmaterial. Oleh karena itu, upaya penanganan yang komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, menjadi sangat mendesak. Implementasi regulasi yang lebih efektif, modernisasi pengawasan, dan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan merupakan langkah strategis yang harus segera diambil. Dengan pendekatan holistik, wilayah perbatasan dapat menjadi pintu gerbang pembangunan nasional yang mendukung pengembangan kesejahteraan dan perekonomian.

Beberapa saran dan rekomendasi dapat diberikan kepada para pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan. Pertama, kebijakan dan pengawasan multilateral perlu diperkuat dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan wilayah perbatasan secara bersama. Upaya ini dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang jelas dan mengikat untuk memastikan koordinasi dan tanggung jawab bersama. Kedua, modernisasi infrastruktur dan teknologi menjadi hal yang penting, karena peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan memerlukan investasi dalam teknologi canggih seperti sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan dan penggunaan drone guna meningkatkan efisiensi serta akurasi pengawasan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat perbatasan harus menjadi prioritas melalui program pembangunan ekonomi dan sosial yang mampu meningkatkan produktivitas lokal, mengurangi ketergantungan terhadap aktivitas ilegal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pengelolaan perbatasan yang lebih aman, berkelanjutan, dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, M., Midhio, I. W., & Khaerudin, K. (2021). Tinjauan Kebijakan Pertahanan Indonesia di Kepulauan Natuna Dihadapkan dengan Perkembangan Pembangunan Pangkalan Militer China. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(12), 918-932.
- Ali, I. M., & Sianturi, D. (2022). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 372-379.
- Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 50-64.
- Caloffi, A., & Serra, M. (2022). Bringing Perroux back in: development pole strategies in Italy and Brazil. In *Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on the Work of François Perroux* (Vol. 40, pp. 145-168). Emerald Publishing Limited.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Fauni, A. M., APM, E. A., Iswandani, I. D., & Salma, N. (2024). Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kemiskinan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, 4(2), 1-24.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.616>
- Pamungkas, C. (2016). Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 147-162. <https://doi.org/10.14203/jmi.v41i2.253>
- Pratiwi, K. I., Putri, N. R., & Efridadewi, A. (2023). Analisis Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Asing (Vietnam) di Laut Natuna. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 9-16.
- Putri, D. Z., Rifai, M., & Marsingga, P. (2024). Diplomasi Kolaboratif Anggota ASEAN alam Sengketa Maritim di Kawasan Laut Cina Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17570–17583. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12647>
- Maulana, Y. R. & Rakhman, M. (2020). Pendekatan Good Governance Dalam Memperkuat Keamanan Perbatasan Negara: Studi di Wilayah Laut Natuna Utara. *Jurnal Wacana Politik*, 5(1), 71-85.
- Natasya, A., & Yuniasih, T. (2023). NCB-Interpol Indonesia Dalam Penanganan Permasalahan Narkotika Lintas Batas di Selat Malaka 2020–2022. *Balcony*, 7(1), 51-64.
- Sabar, A., & Mokodompit, E. A. (2024). Gangguan Keamanan Batas Laut Wilayah Indonesia dan Strategi Untuk Mengatasinya. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(5), 335-339.
- Setiawan, H. D., & Sudja, M. D. (2021). Kompetensi sumber daya manusia kelautan di Indonesia. *Ilmu dan Budaya*, 42(2), 290-305.

- Singh, V. K., Singh, P., Karmakar, M., Leta, J., & Mayr, P. (2021). The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. *Scientometrics*, 126(6), 5113–5142. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5>
- Spykman, N. (2017). Heartland and Rimland. In *The Structure of Political Geography* (pp. 170-177). Routledge.
- Sudiar, S. (2017). Pembangunan wilayah perbatasan negara: Gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489-500. <http://doi.org/10.52239/jar.v3i4.587>
- Sukoco, J. E., & Sutanta, H. (2021). Evaluasi Penetapan Batas Desa Terhadap Segmen Batas Daerah di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 4(1), 41-48.
- Yamamoto, T. (2016). National Security Policy and Contemporary Geopolitics. *The Policy Science Association of Ritsumeikan University, Journal of Policy Science*, 10.